

JURNAL

# Kajian Strategik dan Global

## Geopolitik Dan Isu Perbatasan Dalam Pendekatan Multidisiplin

Margaretha Hanita<sup>3</sup>

[margaretha.hanita@gmail.com](mailto:margaretha.hanita@gmail.com)

---

### Abstract

Recently, the national security issue has been faced with cross-border terrorism issues dominating border issues by referring to the latest cross-border terrorism event of the Marawi City occupation of the Philippines by the ISIS-affiliated Maute terrorist group. Marawi is a continuation of the issue of cross-border terrorism after similar issues in the Afghanistan-Pakistan, Pakistan-India, Uighur region to Thailand and Poso, Poso to the Southern Philippines, and a wave of cross-border terrorism from the Middle East region and countries including Indonesia and European countries to Iraq and Syria to join ISIS. Some of related studies were utilized and from those studies, showed that border issues can be approached with a defense and security management review approach, and national resilience studies. This requires understanding by linking gender, economics, anthropology, sociology, domestic law, international law and international relations studies, since it is realized that geopolitical approaches alone are not sufficient enough to examine these complex issues.

Keywords: cross-border terrorism, migration, geopolitics, national reliance

*Copyright © 2018 Jurnal Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. All rights reserved*

---

<sup>3</sup> Dosen Tetap Kajian Strategik Ketahanan Nasional, SKSG Universitas Indonesia

## 1. Pengantar: Perbatasan sebagai Pintu Masuk Lintas Batas antar Negara

Pendudukan kota Marawi di Pulau Mindanao, Filipina Selatan oleh kelompok bersenjata pimpinan Isnilon Hapillon, pemimpin Abu Sayyaf dan Omarkhayam Maute pemimpin Kelompok Maute selama 148 hari (Mei hingga Oktober 2017), mengingatkan kembali bahwa wilayah perbatasan, baik laut maupun darat adalah wilayah pertahanan yang paling sulit dikontrol. Kelompok Isnilon Hapillon dan Maute --- yang berafiliasi kepada Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) pimpinan Abu Bakar Al Bagdadi yang bermarkas di Mosul, Irak dan kemudian pindah ke Raqqa, Suriah --- berhasil menembus perbatasan laut Filipina. Mereka berhasil menyelundupkan ratusan milisi asing, persenjataan dari senapan serbu ringan, berat, senjata pelontar granat, hingga bom rakitan yang biasa digunakan milisi ISIS di Irak dan Suriah, masuk ke Kota Marawi. Setelah Hapillon dan Maute terbunuh oleh tentara Filipina pada 17 Oktober 2017 yang mengakhiri pendudukan Kota Marawi oleh kelompok bersenjata ini, otoritas Filipina, seperti Inter-Agency Border Security Coordinating Council (IABSCC), mulai mengevaluasi bagaimana wilayah perbatasan negara itu sangat lemah. Peristiwa seperti ini akan terjadi lagi jika strategi pertahanan wilayah perbatasan Filipina tidak segera diperbaiki. Maka, seperti diberitakan media di Filipina, yang juga menulis tentang lemahnya garis pertahanan perbatasan, Panglima Komando Militer Filipina Selatan, Letnan Jendral Rey Leonardo Guerro memerintahkan peningkatan penjagaan di wilayah perbatasan. ISIS, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa digolongkan sebagai organisasi teroris, dan memang demikianlah kenyataannya. ISIS yang memiliki cita-cita khilafah, sebuah konsep negara tanpa tapal batas, mengirim sel-selnya untuk melancarkan

serangan teroris ke seluruh dunia, dari Eropa, Amerika, Mesir, Pakistan, Australia, Thailand, Indonesia dan yang paling besar adalah serangan kelompok Hapillon dan Maute di Filipina. Terorisme merupakan ancaman terbesar lintas batas dewasa ini. Selsel teroris dikirim melewati perbatasan antar negara dan melancarkan serangan mematikan di negara-negara tersebut. Maka tantangan besar pertahanan wilayah perbatasan adalah masuknya gelombang sel-sel terorisme ke negara-negara sasaran(i)

Studi tentang *cross-border terrorism*, migrasi dan *human trafficking*, terutama *women and child trafficking* sudah banyak dilakukan. Temuan-temuan studi itu memang mengejutkan. Penelitian-penelitian yang saya lakukan di sejumlah wilayah perbatasan di Kalimantan menunjukkan *women trafficking* dijalankan secara *cross-border* melalui baik perlintasan perbatasan resmi maupun lintasan perbatasan tidak resmi, yakni melalui jalanjalan tikus untuk menghindari pemeriksaan imigrasi. Para korban perdagangan manusia ini yang melintas batas ke wilayah Malaysia akan ditampung di tempat-tempat penampungan di kota-kota di Serawak. Dari tempat-tempat penampungan tersebut para korban perdagangan manusia disebar ke berbagai tempat, terutama di tempat-tempat hiburan malam dan bekerja di tempat-tempat prostitusi, Malaysia seringkali juga hanya menjadi wilayah singgah untuk dikirim ke negara ketiga. Sel-sel teroris yang beraktifitas di luar Indonesia juga memanfaatkan tempat-tempat *cross-border* yang aman di wilayah perbatasan Kalimantan yang membentang panjang. Kotakota seperti Nunukan di Kalimantan Utara merupakan kota tempat transit setelah mereka berhasil melintas batas dari Filipina Selatan.

Pendudukan serupa di Kota Marawi pernah terjadi di Sabah, wilayah Malaysia ketika sekitar 200 pasukan Kesultanan Sulu,

Filipina menduduki Lahad Datu, Sabah, pada 2013. Kesultanan Sulu mengirim pasukan ke Sabah untuk mengembalikan wilayah Sabah yang mereka klaim sebagai wilayah Kesultanan Sulu. Pendudukan itu juga menimbulkan diskusi tentang strategi pertahanan di wilayah pertahanan di wilayah Sabah dari ancaman Kesultanan Sulu yang memiliki pasukan yang militan. Di Timur Tengah, ISIS mampu menguasai wilayah-wilayah di Irak dan Suriah karena dua negara ini tidak mampu menjaga pertahanan perbatasannya, misalnya dibandingkan Israel dan Lebanon yang mampu menjaga wilayah pertahanan perbatasannya dari serangan milisi ISIS. Bertahun-tahun milisi ISIS menguasai kota-kota besar seperti Fallujah dan Mosul di Irak.

Indonesia memiliki perbatasan darat dan laut yang panjang dengan wilayah negara lain yang memungkinkan mengalami peristiwa pendudukan serupa Kota Marawi, Lahad Datu dan kota-kota di Irak dan Suriah. Maka strategi pertahanan di wilayah perbatasan adalah hal penting untuk diperkuat. Strategi pertahanan di wilayah pertahanan memang bukan hanya pertahanan militer, namun juga pertahanan sosial, budaya, ekonomi, ideologi dan politik. Ancaman yang datang dari wilayah perbatasan juga bukan hanya ancaman militer namun juga ancaman non-militer, seperti gelombang imigran, penyelundupan barang maupun penyelundupan manusia (*human trafficking*), konflik tapal batas, dan wilayah yang digunakan sebagai basis perlawanan dalam gerakan pemisahan diri suatu wilayah, misalnya di Papua. Di Papua, kelompok gerilyawan bersenjata yang berafiliasi pada Organisasi Papua Merdeka, bergerilya di perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Wilayah perbatasan darat yang membentang dari utara di Jayapura hingga ke selatan di Merauke merupakan wilayah gerilya yang luas dan tidak terjangkau oleh strategi pertahanan di

wilayah perbatasan, baik yang dilakukan pasukan pengamanan perbatasan maupun kepolisian. Wilayah itu secara geografis sulit dijangkau karena berupa pegunungan dan hutan belantara.(ii)

Sebuah studi dengan pendekatan geopolitik bahkan mengkaitkan masalah kekuatan ketahanan wilayah perbatasan dengan gerakan sosial gender di sekitar perbatasan. Studi ini unik, dilakukan Jennifer L. Johnson (iii) dan kawan-kawan merupakan studi yang mengeksplorasi aspek multi-aspek dari perbatasan, yang diartikan sebagai sebuah proses. Merujuk pemikiran feminis Gloria Anzaldúa dan bidang studi perbatasan, studi ini mengkonseptualisasikan politik perbatasan sebagai perjuangan yang menantang, melampaui, atau memperkuat batas wilayah dan pengaruhnya, atau bahwa konteks perbatasan dengan wilayah yang ditetapkan secara nasional, termasuk batas sosial dan simbolis inklusi dan pengecualian. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan antara batas geopolitik dan jenis batas sosial dan simbolis lainnya karena keduanya menjadi objek dan tempat perjuangan. Studi ini menawarkan kontribusi penting bagi sosiologi perbatasan. Tidak berfokus pada pergerakan militerisasi wilayah perbatasan geografis kontribusi studi ini terletak pada pendekatan awalnya terhadap analisis gerakan sosial yang batas dan batasannya merupakan lokasi gerakan. Lebih tepatnya, studi ini menggambarkan bagaimana gerakan sosial mempertahankan, bertarung, memproduksi, dan membubarkan batas-batas dan batasan-batasan di wilayah perbatasan. Buku ini terdiri dari sebelas studi kasus berdasarkan data etnografis dan disusun menjadi tiga bagian tematik. Bagian pertama membahas politik perbatasan yang mengambil gender sebagai kategori analisis. Gerakan sosial digambarkan sebagai lokasi di mana wacana dan praktek menganggap perempuan sebagai perwujudan

komunitas nasional atau etnis yang secara simbolis mempertahankan batas-batas nasional dan etnis. Penulis Meera Sehgal menggambarkan bagaimana perempuan ditransformasikan oleh gerakan nasionalis Samiti Hindu di India menjadi penjaga perbatasan yang memperdalam dan mengatur batas-batas antara orang Hindu dan Muslim.

Amerika Serikat mengalami masalah masuknya imigran gelap dari Mexico melalui perbatasan darat yang panjang sehingga sulit dilakukan penangkalan dan pecegahan. Maka, Presiden Donald Trump dalam kampanye presidennya (2016) berjanji akan membangun tembok sepanjang 3.500 kilometer di perbatasan darat dengan Mexico dan sekarang sudah mulai dibangun. Semua ini menandakan bahwa masalah perbatasan adalah masalah yang memiliki dimensi yang luas yang bisa ditelaah dengan teori-teori Geopolitik.

## 2. Teori-Teori Perbatasan dan Teori Geopolitik

Perbatasan memiliki peran penting karena menentukan bentuk negara dan membatasi kegiatan manusia, termasuk kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Perbatasan dapat berfungsi sebagai *barier* yang disepakati antar negara yang berbatasan tersebut. Dalam Bahasa Inggris, perbatasan dibedakan dengan kata *boundary* dan *frontier*, walaupun keduanya merupakan sinonim. *Boundary* adalah istilah perbatasan sebagai ikatan batas wilayah negara atau perbatasan di mana secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan, dan mengikat secara bersama-sama atas rakyatnya di bawah suatu hukum dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan *frontier* adalah istilah yang dikenal dengan garis depan, yang menjadikan daerah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas akan tetapi karena lokasinya berdekatan dengan negara lain, sehingga pengaruh luar dapat masuk ke negara tersebut yang berakibat

munculnya masalah pada sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya setempat yang kemudian berpengaruh pula terhadap kestabilan dan keamanan serta integritas suatu negara. Ini maknanya, perbatasan sebagai titik singgung. *Frontier* dapat juga diistilahkan seperti *foreland*, *borderland* atau *march*.

Teori Perbatasan menurut Karl Haushofer (1869-1946) pencetus Teori Geopolitik, berhubungan dengan perluasan wilayah. Karl Haushofer mengubah geopolitik - sebuah istilah yang ditemukan pada 1899 oleh Rudolf Kjellén, seorang profesor politik Swedia - menjadi sebuah disiplin akademis. Sejalan dengan usaha ini adalah desakan Haushofer bahwa geopolitik harus memberikan panduan praktis bagi politisi Jerman untuk merevisi kondisi Perjanjian Versailles tahun 1919. Dalam sejarah pemikiran geopolitik, Haushofer termasuk generasi kedua pemikir yang terinspirasi oleh tokoh-tokoh seperti Friedrich Ratzel dan Halford Mackinder. Sejalan dengan Mackinder, Haushofer berpendapat bahwa kekuatan laut dan tenaga darat memunculkan berbagai jenis strategi geopolitik. Tidak seperti Mackinder, dia menyarankan agar kekuatan laut utama, terutama Inggris dan Amerika Serikat, merupakan "bajak-bajak laut", yang tertarik untuk mengendalikan rute perdagangan mereka dalam rangka dominasi politik. Dengan demikian, kekuatan laut sangat ingin menjaga kekuatan tanah dibagi di antara mereka sendiri - untuk mengendalikan keseimbangan kekuasaan.(iv)

Haushofer mengemukakan pada 1925 bahwa Jerman dan Rusia, sebagai kekuatan darat, harus membentuk persekutuan balik. Dia juga berharap untuk menambahkan China, kemudian satu kekuatan darat lainnya, dan Jepang, yang paling lemah dari tiga kekuatan laut, dengan apa yang disebutnya sebagai "Blok Benua Eurasia Timur". Dia juga menyerukan agar Jerman menyesuaikan diri dengan nasionalis anticolonial untuk memberi tekanan

pada Inggris dan kekuatan kolonial lainnya. Haushofer, melalui asisten peneliti dan mahasiswa di Universitas Munich, Rudolf Hess, mempengaruhi pemikiran geopolitik

Adolf Hitler. Geopolitik (*Autarky, Lebensraum*) diajarkan langsung oleh Haushofer kepada Hess dan Hitler selama delapan kali kunjungan ke sebuah penjara Bavaria pada 1924, ketika Hitler dan Hess dipenjara karena keterlibatan mereka di peristiwa Balai Bir Bir Munich pada 1923.

Gagasannya yang menghubungkan antara politik dan geografi melahirkan konsep *lebensraum* (*living space* atau tempat tinggal). Adolf Hitler menerapkan konsep ini dengan mengembangkan *lebensraum* ke wilayah Timur. Hitler mengubah konsep awal *lebensraum*. Menurut Hitler lebih mudah dan murah memperluas wilayah daratan Jerman di Eropa daripada mencari koloni di seberang lautan. Hitler juga menambah konsep *lebensraum* dengan muatan rasisme, diantaranya yang menonjol anti ras Yahudi dan mengunggulkan ras Aria. *Lebensraum* dimaknai sebagai upaya mencari tambahan tempat tinggal dengan mencari koloni baru, mengikuti imperium Inggris dan Prancis. *Lebensraum* di zaman Hitler adalah mencaplok wilayah-wilayah negara-negara tetangga di Eropa dengan sasaran pertama Austria dan Ceko-Slovakia. Tiga negara yang jadi satu akan menyediakan *strategic frontiers* yang lebih baik untuk sebuah negara Jerman Raya dan pencaplok-pencaplok ini akan menjadi sumber bahan makanan baru bagi Jerman Raya. Perluasan wilayah dengan menggeser perbatasan dipercaya akan memperkuat Jerman dan membantu memecahkan masalah-masalah internal, menjadikan militer kuat, dan mendorong Jerman menjadi negeri yang bisa memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri dengan penambahan sumber makanan dan sumberdaya alam lainnya.

Holger H. Herwig, sejarawan Jerman menulis buku (v) yang memukau tentang Karl Haushofer. Tujuan Herwig adalah memberikan gambaran akurat tentang Haushofer dan geopolitiknya. Herwig mencatat bahwa mentor geopolitik Haushofer adalah Ratzel, Mahan, Kjellen, yang menciptakan istilah geopolitik pada tahun 1917 dan Mackinder, yang memandang geografi hanya sebagai bantuan untuk pembuatan undang-undang. Studi Herwig mencakup peran Haushofer dalam mendidik Hitler saat dia berada di Penjara Landsberg. Hitler juga membaca karya-karya sejarawan Ranke dan Treitschke, Marx dan Nietzsche, ahli teori militer Clausewitz, Bismarck, dan Chamberlain seorang Darwinis sosial. Pertanyaan yang dipertimbangkan adalah apakah Haushofer adalah seorang Sosialis Nasional dalam semangat dan bagaimana versi ras Hitler tentang geopolitik berbeda dengan versi politik kekuasaan tradisional.

Karl Haushofer, adalah seorang profesor di Universitas Munich, Bavaria, Jerman yang secara luas dikenal sebagai "Bapak Geopolitik". Pada 1945 Amerika Serikat berusaha membawanya ke Pengadilan Nuremberg sebagai penjahat perang karena perannya sebagai "Bapak Baptis Hitler" dan penulis sebenarnya buku *Mein Kampf*. Sejarawan Holger H. Herwig dalam bukunya: *The Demon of Geopolitics, How Karl Haushofer Educated Hitler and Hess* (Rowman & Littlefield Publisher, 2016) menilai ada fiksi dan kenyataan di balik klaim ini. Dengan memanfaatkan secara komprehensif dokumen-dokumen pribadi Haushofer yang sebelumnya tidak tersedia,

Herwig menganalisis konsep geopolitik Haushofer, hubungannya dengan muridnya Rudolf Hess, dan bimbingannya terhadap Hitler dan Hess di Penjara Landsberg pada 1924. Herwig menawarkan wawasan unik tentang pengaruh penting di balik layar

Haushofer dalam memberikan teori *Autarky* dan *Lebensraum* kepada Nazi, alasan kontrol Jerman terhadap Eropa dan dunia. Herwig mrenulis keputusan terakhir Haushofer pada dirinya sendiri: "Saya ingin dilupakan dan dilupakan." Namun Herwig menyimpulkan dengan peringatan bahwa "setan" Geopolitik menuntut pengamatan lebih jauh di zaman baru geopolitik ini.

Teori *Lebensraum* dikecam oleh Office of US Chief of Council pada 7 September 1945 yang menyatakan:

"Haushofer was Hitler's intellectuall godfather. It was Haushofer rather than Hess, who wrote *Mein Kampf* ---

Geopolitics was not merely academic theory. It was a driving, dynamic plan for the conquest of that heartland .... Realy, Hitler was largely only a symbol and a rabble-rousing mouthpiece. The intellectual content of which was the symbol was the doctrine of Haushofer". ("Haushofer adalah Bapak Baptis Hitler. Haushofer lah yang menulis *Mein Kampf*, dan bukan Hess -- Geopolitik bukanlah teori akademis. Itu adalah panduan dan rencana yang dinamis untuk menaklukkan jantung dunia itu .... Sebenarnya, Hitler sebagian besar hanya simbol dan corong yang sangat berani. Sosok intelektual yang merupakan simbolnya adalah doktrin Haushofer ").(vi)

Jauh sebelum Hitler, kaum pendatang Eropa yang mendirikan negara Federasi Amerika Serikat sudah menerapkan konsep *Lebensraum* dengan menaklukkan Puerto Rico, mengakuisisi Texas, New Mexico dan California setelah Perang Mexico, 1846-1848, dan menduduki Hawaii, Guam dan kepulauan di Pasifik lainnya. Wilayah-wilayah yang dihuni oleh bangsa-bangsa berbeda tersebut bergabung ke dalam wilayah Amerika Serikat

bukan secara suka rela melainkan melalui penaklukan.(vii) Juga dipraktekkan Rusia dengan mencaplok negara-negara Eropa Timur dan menggabungkannya dalam federasi Uni Soviet. Uni Soviet akhirnya runtuh dan sepuluh tahun setelah pecahnya Uni Soviet, namun isu identitas internasional Rusia masih belum sepenuhnya terselesaikan. Dmitri Trenin, seorang ahli geopolitik Rusia, berpendapat bahwa Rusia harus bergabung dengan Barat dengan menjadi terintegrasi dengan Uni Eropa dan dengan membangun aliansi dengan Amerika Serikat. Dia menggambarkan tantangan politik, ekonomi, demografis, agama, dan strategis yang dihadapi Rusia dalam kaitannya dengan negara-negara tetangga - di Eropa Timur, di sepanjang Laut Baltik, di sekitar Laut Kaspia, di Asia Tengah, dan di Timur Jauh. Trenin menunjukkan bahwa waktu Rusia sebagai pemimpin dominan kawasan ini telah berakhir, dan bahwa Rusia dan Eurasia tidak lagi memiliki tujuan geopolitik yang sama.(viii)

Teori Geopolitik *Lebensraum* diperjelas Friedrich Ratzel yang memperkenalkan pendekatan sistematis pertama terhadap geografi politik yang didasarkan secara ilmiah dalam hukum seleksi alam dan evolusi. Ini menguraikan mitos yang luar biasa tentang hubungan "organik" antara *volk* (manusia), *boden* (wilayah), dan *staat* (negara), dan memperkenalkan konsep *Lebensraum* yang terkenal, di mana Ratzel menggambarkan negara atau sebuah kerajaan sebagai organisme hidup dengan organ dalam, batas pelindung eksternal, dan dorongan yang melekat pada ekspansi. Maka menurut Ratzel, setiap negara memiliki konsepsi tempat tinggal, yaitu sebuah gagasan tentang kemungkinan batas wilayah kekuasaannya. Kehancuran setiap negara merupakan hasil dari konsepsi tempat yang menyempit.(ix)

Studi Geopolitik ini sekarang menjadi penting dan menarik minat para ilmuwan multi disiplin. Anssi Paasi menulis:

“Studi *boundaries, frontiers, border* atau *border area* (wilayah perbatasan), merupakan tradisi kajian geografi politik yang penting. Saat ini sangat populer di sejumlah bidang akademik. Akademisi tidak hanya mempelajari kasus perbatasan tembok di seluruh dunia tetapi juga sering mencoba untuk berteori lebih umum tentang perbatasan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, psikologis atau budaya. Minat ini memiliki banyak latar belakang seperti runtuhnya Perang Dingin-tatanan orisinal dan dikotomi Barat-Timur yang berakar kuat, penguatan dan perluasan Uni Eropa, munculnya kecenderungan rumit yang terkait dengan globalisasi, dampak bentuk komunikasi baru pada interaksi sosial dan geo-imajinasi grafis, masalah imigrasi dan pengungsi, dan lain-lain.

Kecenderungan yang sama ini dianggap penting dalam lenyapnya tapal batas.”(x)

### 3. Garis Perbatasan dan Wilayah Perbatasan

Di dalam peta garis perbatasan dua negara merupakan sebuah garis yang dapat berupa garis lengkung atau garis lurus. Dalam kenyataannya, yang dimaksud dengan garis perbatasan ini adalah bidang vertikal yang melalui permukaan tanah lapisan bawah tanah dan udara. Jadi garis perbatasan itu berlaku bagi kegiatan-kegiatan di bawah tanah seperti pertambangan, di udara dan di atas permukaan bumi. Garis batas darat biasanya ditetapkan secara alami (*natural*) dan secara buatan (*artificial*). Garis batas darat alami merupakan bentukan bentang alam yang

digunakan untuk tanda batas suatu negara (misalnya sungai dan atau gunung atau perbukitan). Fungsi garis batas tidak hanya merupakan garis demarkasi yang memisahkan sistem hukum yang berlaku antar negara, tetapi juga *contactpoint* (titik singgung) struktur kekuatan teritorial nasional dari negara-negara yang berbatasan.

### 4. Tembok Pembatas Perbatasan sebagai Strategi Pertahanan

Selain Amerika Serikat yang sedang membangun tembok di perbatasan dengan Mexico, Israel yang sudah membangun tembok tinggi di perbatasan dengan palestina, India dan Pakistan juga membangun tembok perbatasan untuk melindungi diri dari serangan *cross-border terrorism*. Berikut ini adalah riset Maria Amjad: tentang pembangunan tembok dan pagar pembatas di perbatasan India-Bangladesh, India-Pakistan dan Pakistan-Afganistan.(xi)

India membangun tembok dan pagar di perbatasannya dengan Bangladesh. Di sisi timur, India berencana membangun penghalang, pagar kawat berduri sejauh 3.406 kilometer dan tembok beton setinggi di bawah 3 meter, untuk mencegah imigrasi lintas batas dan perdagangan manusia dari Bangladesh. India memiliki perbatasan internasional sepanjang 4.096 kilometer, perbatasan darat terpanjang kelima di dunia. Sejumlah tonggak menandai perbatasan antara kedua negara tersebut. Kesepakatan batas darat untuk menyederhanakan perbatasan diratifikasi baik oleh India dan Bangladesh pada 7 Mei 2015. India memperkuat hubungan bilateral dengan Bangladesh dengan membangun jaringan pipa bahan bakar minyak berdasarkan perjanjian pasokan 15 tahun dengan Bangladesh. Selanjutnya, hubungan kereta api dan jalan yang tersedia untuk transportasi orang dan barang di perbatasan India-Bangladesh juga menjadi aspek untuk

memperkuat hubungan di perbatasan tersebut. Kerja sama nuklir untuk tujuan damai dan bantuan militer India ke Bangladesh semuanya dimaksudkan untuk mendorong hubungan bilateral yang kuat. Namun, radikalisme Muslim Bangladesh dan keterlibatan mereka ke dalam aktifitas jihadis mencemaskan India. India sudah menghadapi radikalisme jihadis Pakistan dan sekarang jika Bangladesh jatuh ke tangan jihadis, India harus menghadapi dua perbatasan yang akan sangat rawan. Oleh karena itu, India mulai membangun pagar untuk mencegah masuknya orang-orang Bangladesh ke negara tersebut. Selain itu, perbatasan tersebut digunakan pengungsi Rohingya dari negara bagian Rakhine, Burma, untuk masuk ke wilayah India.

India juga membangun tembok di perbatasannya dengan Pakistan. Berdasarkan Garis Radcliffe pada 1947, negara bagian India dan empat provinsi di Pakistan dipisahkan. Perbatasan itu melintas dari Line of Control (LoC), yang memisahkan Kashmir yang dikelola India dan Kashmir yang dikelola Pakistan di utara, ke Wagah, yang memisahkan negara bagian Punjab India dan Provinsi Punjab Pakistan di timur. Zero Point memisahkan negara bagian India di Gujarat dan Rajasthan ke provinsi Sindh, Pakistan, di selatan. LoC yang memisahkan Kashmir yang dikelola India dengan Kashmir Pakistan adalah salah satu batas paling kontroversial di dunia. Garis perbatasan tersebut telah menyaksikan banyak konflik, pertengkaran, dan perang antara kedua negara tersebut. Yang terbaru adalah bentrokan India-Pakistan di sepanjang LoC pasca serangan Uri pada 2016. India menuduh Pakistan mendukung kelompok teroris bersenjata untuk menyerang basis pemerintahan di belakang garis pertahanan tentara India di Uri, yang dikelola oleh Kashmir India. Selain itu, India juga menyalahkan sepuluh orang yang menyerang Hotel Taj dan Oberoi, Stasiun

Kereta Api Pusat, dan Pusat Yahudi di Mumbai pada 2008 dikaitkan dengan organisasi teroris yang berbasis di Pakistan, Lashkar-e-Tayyiba, yang dipimpin oleh Hafiz Muhammad Saeed. Untuk menjamin keamanan di sepanjang LoC ini, India memutuskan memagar perbatasannya di sepanjang LoC. India percaya bahwa pemagaran perbatasan akan membatasi gerakan lintas batas terorisme dan infiltrasi militan ke India.

Pakistan memutuskan membangun pagar di sepanjang Durand Line yang berbatasan dengan Afganistan, dan keputusan ini dipengaruhi oleh terorisme lintas batas dan pergerakan bebas teroris masuk dan keluar dari wilayah Pakistan. Kedua negara berbagi perbatasan sejauh 1.500 mil yang dikenal secara internasional yang dikenal sebagai Durand Line, yang dibuat pada abad ke-19 ketika Inggris menguasai wilayah tersebut. Perbatasan kedua negara telah lama menjadi isu yang diperdebatkan. Sejak jatuhnya pemerintah Taliban pada 2001, pejabat Afghanistan dan negara-negara Barat yang menguasai Afghanistan, menyatakan bahwa para pemimpin Taliban Afghanistan mempertahankan tempat-tempat tersembunyi di Pakistan, khususnya di kota Quetta untuk basis pertahanan mereka. Gerakan yang bebas melintasi perbatasan telah membantu militan menghindari kekalahan dalam perang 15 tahun yang dipimpin oleh Amerika Serikat ini. Pada saat yang sama, Afghanistan menuduh Pakistan menyimpan terorisnya sendiri, menginginkan pemimpin Taliban Afghanistan dan sekutu jaringan Haqqani. Sebaliknya, Pakistan menuduh Afghanistan menutup mata terhadap militan Islam yang beroperasi di sepanjang perbatasan dan melakukan serangan mematikan di wilayah mereka yang berbasis di seberang perbatasan di Afghanistan. Pemerintah Pakistan percaya bahwa sebuah perbatasan yang dikelola dengan lebih baik, aman dan damai adalah demi kepentingan kedua negara yang telah

memberikan pengorbanan fenomenal dalam perang melawan terorisme.

Namun Reece Jones, profesor departemen Geografi di Universitas Hawaii berpendapat bahwa pagar perbatasan gagal mencegah lintas batas terorisme dan untuk melindungi penduduk dari ancaman eksternal. Menurut Organisasi Migrasi Internasional, lebih dari 10.000 orang tewas karena berusaha menyeberangi perbatasan sejak awal 2015. Jones berpendapat kematian ini terkait langsung dengan penerapan strategi pencegahan dan pembangunan tembok di perbatasan. Sementara tembok dan pagar perbatasan dibangun di Asia Selatan dan seluruh dunia efektif sebagai simbol yang menunjukkan bahwa politisi melakukan sesuatu untuk mengatasi ancaman yang dirasakan yang dibawa oleh gerakan yang tidak sah. Ancaman yang dirasakan ini bisa merupakan ancaman ekonomi.(xii)

## 5. Teknologi dan Redefinisi Perbatasan Wilayah Teritorial

Teknologi yang terus berkembang, seperti teknologi informasi, termasuk teknologi persenjataan menyebabkan perbatasan teritorial harus diredifinisi. Dengan berkembangnya teknologi informasi serangan dari luar tidak harus melewati perbatasan teritorial. Serangan *cyber* seperti penyebaran virus ke server-server pertahanan maupun server-server bisnis dan layanan masyarakat bisa dilakukan dari manapun di seluruh dunia. Juga serangan terhadap sistem teknologi informasi perbankan nasional yang bisa mengancam perekonomian nasional sebuah negara bisa dilancarkan dari luar negara tersebut. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang menghubungkan secara massal warga negara suatu negara dengan warga negara di negara-negara lain seperti media sosial (Facebook, WhatsApp, Telegram, BlackBerry Messenger) menyebabkan batasbatas teritorial antar negara hilang. Penduduk dunia bisa

berkomunikasi dan bertukar informasi secara *realtime*, tidak memerlukan *exit-permit* dari negara-negara bersangkutan. Dengan berkembangnya teknologi informasi ini maka tantangan pertahanan nasional suatu negara juga makin kompleks, jauh lebih kompleks daripada tantangan pertahanan di perbatasan teritorial. Di dunia teknologi informasi, perbatasan nasional sebuah negara harus didefinisikan lagi. Teknologi informasi dianggap ancaman nyata.

Tetapi di sisi lain, dengan mulai bergejolaknya geopolitik kawasan-kawasan dunia, perbatasan teritorial tetaplah penting. Walter Russel Mead menulis *essay*, dalam judul yang provokatif: *The Return of Geopolitics, The Revenge of the Revisionist Powers*. Berikut ini kutipannya:

“Sejauh ini, tahun 2014 telah menjadi hari yang penuh gejolak, karena persaingan geopolitik telah menyerbu kembali ke panggung utama. Entah itu pasukan Rusia yang merebut Krimea, Tiongkok yang membuat klaim agresif di perairan pesisirnya, Jepang yang merespons dengan strategi yang semakin asertif, atau Iran yang mencoba menggunakan aliansi dengan Suriah dan Hizbullah untuk mendominasi Timur Tengah, kekuatan kuno memainkan kembali perannya dalam hubungan internasional. Amerika Serikat dan Uni Eropa setidaknya menemukan *trend* seperti itu yang mengganggu. Keduanya lebih suka memindahkan masalah geopolitik di wilayah dan kekuatan militer dan lebih fokus pada tatanan dunia dan tata kelola global: liberalisasi perdagangan, non-proliferasi nuklir, hak asasi manusia, peraturan hukum, perubahan iklim, dan sebagainya. Memang, sejak berakhirnya Perang Dingin, tujuan terpenting dari kebijakan luar negeri AS dan UE adalah untuk mengalihkan hubungan internasional

jauh dari masalah *zero-sum* ke negara-negara yang *win-win*. Untuk diseret kembali ke kontes sekolah tua seperti di Ukraina tidak hanya mengalihkan waktu dan energi dari masalah penting tersebut. Hal itu juga mengubah karakter politik internasional. Seiring suasananya berubah menjadi gelap, tugas mempromosikan dan memelihara tatanan dunia tumbuh semakin menakutkan. Tapi orang-orang Barat seharusnya tidak pernah mengharapkan meninggalkan teori geopolitik kuno. Mereka melakukannya hanya karena mereka secara fundamental salah membaca apa yang dimaksud dengan runtuhnya Uni Soviet, kemenangan ideologis demokrasi kapitalis-liberal atas komunisme, bukan keusangan dari kekuatan super. Tiongkok, Iran, dan Rusia tidak pernah membeli penyelesaian geopolitik yang mengikuti Perang Dingin, dan mereka berusaha keras untuk membatalkannya. Proses itu tidak akan damai, dan apakah revisionisnya berhasil, usaha mereka telah mengguncang keseimbangan kekuasaan dan mengubah dinamika politik internasional”(xiii)

Tulisan ini mengingatkan betapa pentingnya kembali lagi perhatian pada strategi pertahanan konvensional dengan tekanan pada perbatasan teritorial di tengah teknologi informasi yang berkembang pesat. Bagaimanapun bangkitnya geopolitik di banyak kawasan di dunia menekankan kembali betapa penting pertahanan di garis pertahanan, terutama setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti digambarkan di atas dan peristiwa-peristiwa pendudukan ISISI atas wilayah-wilayah Irak dan Suriah dengan kekerasan yang brutal yang menyebabkan ratusan ribu kematian, juga masifnya kasuskasus perskosaan, perbudakan seksual,

pengusiran dan pembasmian etnis, pemaksaan anak-anak menjadi tentara dan pelanggaranpelanggaran hak asasi manusia berat lainnya di kawasan itu.

## 6. Kesimpulan

Masalah-masalah perbatasan adalah masalah yang rumit, kompleks dan multi dimensional, karenanya maka harus didekati dengan pendekatan multi-disiplin. Geopolitik adalah salah satu bidang kajian yang sering digunakan dalam kajian perbatasan, karena isu-isu perbatasan seringkali merupakan implikasi dari dinamika politik dalam negeri, politik kawasan maupun politik global. Tetapi juga isu-isu perbatasan juga bisa didekati dengan pendekatan kajian manajemen pertahanan dan keamanan, dan tentu saja kajian ketahanan nasional. Dari hal-hal yang dikemukakan di atas, isu-isu perbatasan juga dikaitkan dengan kajian gender, ekonomi, antropologi, sosiologi, hukum domestik, hukum internasional dan kajian hubungan internasional. Geopolitik saja tidak cukup untuk mengkaji isu-isu yang kompleks itu. Isuisu dominan mutakhir yang muncul dalam pembahasan paper ini adalah isu *cross-border terrorism*, yang menjadi isu utama masalah perbatasan hampir di semua kawasan karena serangan teroris adalah masalah global. Isu-isu *cross-border terrorism* ini mendominasi isuisu masalah –masalah perbatasan dengan merujuk peristiwa *cross-border terrorism* terbaru yakni pendudukan Kota Marawi di Filipina oleh kelompok teroris Maute yang berafiliasi ke ISIS. Marawai adalah kelanjutan dari isu *cross-border terrorism* setelah isu-isu serupa terjadi di kawasan Afganistan-Pakistan, Pakistan-India, Uighur ke Thailand dan Poso, Poso ke Filipina Selatan, dan paling massif adalah gelombang *cross-border terrorism* dari kawasan Timur Tengah dan negara-negara lainnya, termasuk Indonesia dan negara-negara Eropa ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS.

Di Eropa, Amerika Serikat dan Australia, sel-sel teroris yang melancarkan serangan di sana adalah para imigran yang sebelumnya merupakan warga negara biasa yang memperoleh kewarganegaraan di negaranegara tujuan. Mereka diradikalisasi hingga menjadi sel yang siap melakukan seranganserangan mematikan di kota-kota di Eropa, Amerika Serikat dan Australia. Kasus-kasus ini juga merupakan. Ini merupakan salah satu pola *cross-border terrorism* namun berbeda proses. Ketika memasuki negara-negara tujuan melalui jalur imigrasi resmi mereka bukan teroris namun setelah lama tinggal di negara tujuan diradikalisasi.

Jadi, sangatlah penting bagi kajiankajian multi disiplin untuk melakukan konsolidasi multi-disiplinnya untuk menjawab tantangan kajian masaah-masalah perbatasan, terutama kajian yang menyeluruh terhadap isu-isu penting *cross-border terrorism* ini.

<sup>i</sup> Baca juga misalnya Michel R. Ronzkowski, *Terrorism and Organized Hate Crime, Intelligence Gathering, Analysis and Investigation*, CRC Press, 2006.

<sup>ii</sup> Margaretha Hanita, "Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan dengan Negara Tetangga dalam Persepektif Ketahanan Nasioanal, Studi Kasus Daerah Perbatasan di Kalimantan, Papua dan Timor Barat, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, 2002.

<sup>iii</sup> *Border Politics Social Movements, Collective Identities, and Globalization*, Nancy A. Naples and Jennifer Bickham Mendez (ed), New York University Press, 2014.

<sup>iv</sup> Jorg Michael Dostal, riview on *The Demon of Geopolitics: How Karl Haushofer Educated Hitler and Hess*, *thimehighereducation.com*, 19 May, 2016.

<sup>v</sup> Holger H. Herwig dalam bukunya: *The Demon of Geopolitics, How Karl Haushofer Educated Hitler and Hess* (Rowman & Littlefield

Publisher, 2016) <sup>vi</sup> Holger H, Herwig, "Geopolitic: Haushofer,

Hitler and Lebensraum", *Journal of Strategic Studies*, Volume 22, 1999. <sup>vii</sup> Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural, Teori Liberal mengenai Hak-Hak Minoritas*, LP3ES, Jakarta, 2003, hal 15.

<sup>viii</sup> Dmitri Trenin, *The End of Eurasia: Russia on the Border Between Geopolitics and Globalization*, Carnegie Endowment for Int'l Peace, Washington DC 2002.

<sup>ix</sup> Andrew Gyorgy, *Geopolitics, thenewGermanScience.*, University of California publication in international relations, 1944, halaman 24. Baca juga Sergei V. Sevastianoβv et all, *Introductiontoborderstudies*, Vladivostoc: Danaulka, 2015, halaman 18.

<sup>x</sup> Anssi Paasi *Border Studies on the Move*, Routledge Taylor and Francis Inc, 2005 <sup>xi</sup> Maria Amjad, "Cross-Border Terrorism, Migration and Human Trafficking: The Rise of Border Walls in South Asia" <http://modern diplomacy.eu>.

<sup>xii</sup> Rene Jones, *Border Walls: Security and the War on Terror in the United States, India, and Israel*, Paperback, 2012.

<sup>xiii</sup> Walter Russel Meae, *The Return of Geopolitics, The Revenge of the Revisionist Powers*, essay, Mahajah Foreign Affairs, Volume 97, Number 1, Januari/February 2018.

## Daftar Pustaka

Amjad, Maria "Cross-Border Terrorism, Migration and Human Trafficking: The Rise of Border Walls in South Asia" <http://modern diplomacy.eu>.

Gyorgy, Andre, *Geopolitics, thenewGermanScience.*, University of California publication in international relations, 1944, halaman 24. Baca juga Sergei V. Sevastianoβv et all,

- Introduction to border studies*, Vladivostok : Danaulka, 2015, halaman 18. Hanita, Margaretha, "Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan dengan Negara Tetangga dalam Persepektif Ketahanan Nasional, Studi Kasus Daerah Perbatasan di Kalimantan, Papua dan Timor Barat, Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Strategik Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, 2002.
- Herwig, Holger H. dalam bukunya: *The Demon of Geopolitics, How Karl Haushofer Educated Hitler and Hess* (Rowman & Littlefield Publisher, 2016)
- , "Geopolitic: Haushofer, Hitler and Lebensraum", *Journal of Strategic Studies*, Volume 22, 1999.
- Jones, Rene, *Border Walls: Security and the War on Terror in the United States, India, and Israel*, Paperback, 2012.
- Kymlicka, Will, *Kewargaan Multikultural, Teori Liberal mengenai Hak-Hak Minoritas*, LP3ES, Jakarta, 2003, hal 15.
- Meae, Walter Russel, *The Return of Geopolitics, The Revenge of the Revisionist Powers*, essay, Mahajah Foreign Affairs, Volume 97, Number 1, Januari/February 2018.
- Naples, Nancy A. and Jennifer Bickham  
Mendez (ed), *Border Politics Social Movements, Collective Identities, and Globalization*, New York University Press, 2014.
- Paasi, Anssi, *Border Studies on the Move*, Routledge Taylor and Francis Inc, 2005
- Ronzkowski, Michel R., *Terorism and Organized Hate Crime, Intelligence Gathering, Analysis and Investigation*, CRC Press, 2006.
- Trenin, Dmitri, *The End of Eurasia: Russia on the Border Between Geopolitics and Globalization*, Carnegie Endowment for Int'l Peace, Washington DC 2002.